



Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kebijakan Publik di Kota Pekanbaru

¹ Oka Suleman, ² Zulkarnaini,

Public Administration, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia ^{1,2}

Email : okasuleman11@gmail.com¹, zulkarnainfisip@lecturer.unri.ac.id²,

Abstract. *Urban environmental management has become an important issue in modern times, particularly in Pekanbaru, a city experiencing rapid growth and high levels of urbanization. This study aims to analyze public policy-based environmental management in Pekanbaru, focusing on the effectiveness of policies implemented by the local government to preserve environmental sustainability. Using a qualitative approach, data were collected through interviews with government officials, environmental experts, and local residents, as well as a review of relevant policy documents. The findings indicate that although existing environmental management policies are relatively comprehensive, there are several challenges in their implementation, including a lack of public awareness, limited funding, and suboptimal coordination between sectors. Therefore, this study recommends improvements in inter-agency coordination, increased public participation, and regular evaluations of policies to enhance the effectiveness and sustainability of environmental management in Pekanbaru. In this way, public policy-based environmental management is expected to contribute to the creation of a green, clean, and livable city.*

Keywords: Environmental management, public policy, Pekanbaru, sustainability, public participation.

Abstrak. Pengelolaan lingkungan di perkotaan semakin menjadi isu penting dalam era modern ini, khususnya di Kota Pekanbaru, yang mengalami pertumbuhan pesat dan dampak dari urbanisasi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, pengamat lingkungan, serta masyarakat setempat, serta kajian terhadap dokumen-dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan lingkungan yang ada sudah cukup komprehensif, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta koordinasi yang belum optimal antara berbagai sektor. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan dalam hal koordinasi antar instansi terkait, peningkatan partisipasi masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada agar pengelolaan lingkungan di Kota Pekanbaru dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik diharapkan dapat mendukung tercapainya kota yang hijau, bersih, dan nyaman untuk dihuni.

Kata kunci: Pengelolaan lingkungan, kebijakan publik, Pekanbaru, keberlanjutan, partisipasi masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru, telah membawa dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan. Dengan peningkatan jumlah penduduk yang cepat dan kebutuhan akan ruang yang semakin besar, kota ini mengalami konversi lahan yang luas, yang berimbas pada degradasi lingkungan. Masalah seperti polusi udara, pengelolaan sampah yang tidak efisien, serta kerusakan ekosistem menjadi tantangan utama dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik dan berbasis kebijakan publik yang efektif menjadi sangat penting untuk menciptakan kota yang layak huni bagi masyarakatnya.

Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, memiliki posisi yang sangat strategis baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pekanbaru merupakan pusat perdagangan, industri,

dan pendidikan, yang menarik banyak pendatang untuk menetap di kota ini. Namun, pesatnya pertumbuhan kota tersebut juga berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca, peningkatan volume sampah, serta degradasi kualitas udara yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengelolaan lingkungan menjadi hal yang sangat vital dalam perencanaan pembangunan kota.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan berbagai kebijakan publik terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan tersebut melibatkan pengaturan penggunaan lahan, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas udara. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan ini sudah ada, tantangan besar tetap muncul dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan, yang menyebabkan kebijakan yang ada tidak berjalan secara optimal.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan lain dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kesulitan dalam menyediakan dana yang memadai untuk program-program lingkungan yang bersifat jangka panjang. Akibatnya, beberapa program pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau bahkan terhenti di tengah jalan. Hal ini mempengaruhi efektivitas dari kebijakan yang telah diterapkan.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mengurangi polusi, mengelola sampah, serta menjaga kelestarian alam. Namun, kesadaran lingkungan masyarakat di Pekanbaru masih terbilang rendah, terutama dalam hal pengelolaan sampah dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Tanpa keterlibatan masyarakat yang maksimal, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan.

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan kota juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, bukan hanya keuntungan ekonomi sesaat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang ada dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan kualitas lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.

Seiring dengan peningkatan kesadaran global tentang pentingnya menjaga lingkungan, banyak kota-kota besar di dunia mulai mengembangkan kebijakan berbasis lingkungan yang

lebih baik. Di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik yang ada di Kota Pekanbaru telah berhasil mengelola lingkungan dan menciptakan ruang hidup yang nyaman bagi warganya.

Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah kota perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Salah satu langkah yang penting adalah melakukan kajian terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, serta perlindungan terhadap ruang terbuka hijau. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi penerapan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Upaya pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik di Pekanbaru memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Peran serta sektor swasta dalam mendukung kebijakan lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan di Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, agar Pekanbaru dapat menjadi kota yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan layak huni bagi seluruh warganya.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organism; faktor-faktor ini dapat berupa organism hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu a) biotik: makhluk (*organism*) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain (Soegianto, 2010).

Menurut Munadjat Danusputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang di tempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak sebagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni (Danusaputra, 1985):

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
 - a) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan meteril (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain.
 - b) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
 - c) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideology, bahasa, dan lain-lain.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Berdasarkan faktor penyebabnya bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu (Soemartono, 1991):

1. Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam.

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak porandakan bumi serambi mekah dan nias, serta gempa 6,5 skala Ritcher yang meratakan kawasan Lombom dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup karena faktor manusia.

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai kebentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan apa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar, terutama untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, tidak sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, pengelolaan lingkungan harus bersifat lentur dan menjangkau semua *stakeholder* (Badan Lingkungan Hidup, 2014).

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

Mengantisipasi isu lingkungan global.

Kebijakan Publik

Istilah kebijakan public merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris,yaitu public policy ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra wibawa, 1994;Muhadjir Darwin, 1198) danada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy,2001;Abdul Wahap,190). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi

“kebijakan” atau “krbijaksanaan” kecendrungan untuk *Policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* di terjemahkan menjadi kebijakan publik (Anggara, 2014).

Menurut Thomas R. Dye, “*public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apa bila pemrrintah memilih untuk melakaukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemrintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya (Anggara, 2014).

Sementara itu, Thomas Dye mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah segala sesuatu yang di kerjakan atau tidak di kerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Lingkup dari kebijakan publik sendiri begitu luas, mencakup berbagai bidang dan sector mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan lingkup lainnya. Disisi lain bila di telisik dari hirarkinya, kebijakan public dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah. Kabupaten/kota, sampai dengan keputusan bupati/walikota.

Secara terminology, definisi kebijakan public (*public policy*) cukup banyak tergantung dari sudut mana mengartikannya. Menurut Eston, pengertian kebijakan public sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa secara keseluruhan kepada anggota masyarakat. Sementara menurut Laswell dan Kaplan memberikan definisi tentang kebijakan public sebagai *projected program of goal, value and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terkait kebijakan lingkungan yang diterapkan di Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, pejabat terkait di Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat yang terlibat langsung dalam program lingkungan, serta pengamat dan praktisi lingkungan yang memiliki pengetahuan terkait pengelolaan lingkungan di kota ini. Analisis data dilakukan dengan

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik, serta member checking untuk memastikan keakuratan temuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan, keberhasilan, dan solusi dalam pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik di Kota Pekanbaru, serta rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis

Keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang telah diterapkan dan hasil yang mulai tampak meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kebijakan yang cukup berhasil adalah program Pekanbaru Bersih, yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Melalui program ini, terlihat adanya pengurangan sampah di beberapa titik rawan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan. Masyarakat mulai lebih peduli terhadap pemilahan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, yang berkontribusi pada penurunan volume sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Keberhasilan lain yang patut dicatat adalah peningkatan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pusat kota. Pemerintah Kota Pekanbaru telah berhasil menambah luas area hijau dengan beberapa proyek pengembangan taman kota dan kawasan hijau lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara, menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Meskipun jumlah RTH masih terbatas, penambahan ruang hijau ini memberikan dampak positif terhadap penurunan suhu udara kota dan memperbaiki kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Selain itu, upaya pengurangan emisi kendaraan bermotor melalui peningkatan kualitas transportasi publik juga menunjukkan hasil positif meskipun belum sepenuhnya optimal. Beberapa kebijakan untuk meningkatkan sistem transportasi publik, seperti penyediaan bus kota dengan rute yang lebih efisien, mulai diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Kebijakan ini secara bertahap mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi dan memberikan alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan bagi warga Pekanbaru.

Keberhasilan lain juga terlihat dalam pengelolaan sampah melalui peningkatan fasilitas pengolahan dan pemilahan sampah di beberapa area. Program-program edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat dan berbagai organisasi non-pemerintah, berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah tangga. Meskipun masih ada tantangan dalam hal infrastruktur dan partisipasi masyarakat yang belum optimal, namun langkah-langkah ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam pengelolaan sampah di kota ini.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik di Pekanbaru juga didukung oleh peran aktif dari sektor swasta. Beberapa perusahaan besar di Pekanbaru mulai melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon dan program pengurangan limbah industri. Keterlibatan sektor swasta dalam program-program lingkungan ini semakin memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan lingkungan di Pekanbaru masih menghadapi sejumlah tantangan, keberhasilan yang dicapai melalui kebijakan publik menunjukkan adanya perubahan positif dalam kesadaran masyarakat dan kualitas lingkungan. Dengan adanya kebijakan yang tepat dan dukungan dari masyarakat serta sektor swasta, pengelolaan lingkungan di Pekanbaru diharapkan dapat terus berkembang menuju kota yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan.

Tantangan dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kebijakan Publik di Kota Pekanbaru

Pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengatur pengelolaan lingkungan, tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut tetap besar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang diterapkan sering kali melibatkan beberapa dinas dan instansi, namun karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan kewenangan, implementasi kebijakan menjadi tidak optimal. Misalnya, pengelolaan sampah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan instansi lainnya, namun kurangnya koordinasi antara instansi-instansi ini sering menyebabkan tumpang tindih program dan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga ahli. Pemerintah Kota Pekanbaru sering kali menghadapi kesulitan dalam menyediakan

anggaran yang cukup untuk mendukung program-program pengelolaan lingkungan yang bersifat jangka panjang. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga ahli di bidang lingkungan juga menjadi kendala dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan baik. Kurangnya pelatihan bagi aparatur pemerintah dan petugas lapangan juga memperburuk keadaan, karena mereka tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mengelola masalah lingkungan yang semakin kompleks.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan di Pekanbaru. Meskipun sudah ada berbagai program sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam, kesadaran masyarakat masih terbatas. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan dan kurang mendukung upaya pemilahan sampah, yang seharusnya dapat mengurangi volume sampah yang dihasilkan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah dan kebijakan lingkungan lainnya tidak dapat berjalan dengan efektif. Kesadaran yang rendah ini juga memperburuk masalah seperti pencemaran lingkungan, karena kebiasaan buruk masyarakat yang kurang peduli terhadap dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan di Pekanbaru. Infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti kurangnya tempat pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan fasilitas pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, menghambat upaya pengurangan sampah dan pengelolaan limbah yang lebih efisien. Hal ini berimbas pada tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik, yang akhirnya mencemari lingkungan dan merusak ekosistem kota.

Tantangan lain yang dihadapi adalah pertumbuhan pesat sektor pembangunan yang mengancam ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Pekanbaru. Meskipun telah ada kebijakan yang mengatur tentang perlindungan RTH, kebutuhan akan ruang untuk pembangunan properti dan infrastruktur menyebabkan banyaknya lahan hijau yang berkurang. Konversi lahan yang terjadi tanpa pengawasan yang ketat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, seperti berkurangnya kualitas udara dan peningkatan suhu kota. Pengembangan kota yang tidak memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan semakin memperburuk kondisi ini.

Terakhir, kurangnya partisipasi sektor swasta dalam mendukung kebijakan pengelolaan lingkungan juga menjadi tantangan penting. Banyak perusahaan di Pekanbaru yang belum mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional mereka. Padahal, sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah, baik melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ramah lingkungan, maupun dalam mendanai

program-program pengelolaan lingkungan. Tanpa kontribusi sektor swasta, pengelolaan lingkungan di kota ini akan tetap terbatas dan kurang berdampak.

Secara keseluruhan, pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik di Kota Pekanbaru menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar instansi, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru akan sulit tercapai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis kebijakan publik di Kota Pekanbaru telah mengalami beberapa kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, seperti program "Pekanbaru Bersih," penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan upaya pengurangan emisi kendaraan bermotor, telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, tantangan seperti koordinasi antar instansi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta konversi lahan untuk pembangunan properti masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keberhasilan yang dicapai menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pengelolaan lingkungan di Pekanbaru dapat terus berkembang.

Sebagai saran, pertama, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat kota, termasuk fasilitas pemilahan sampah yang lebih memadai. Keempat, sektor swasta harus lebih aktif dalam mendukung kebijakan lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pelestarian alam dan pengurangan dampak lingkungan dari kegiatan industri. Terakhir, pemerintah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mengatasi masalah lingkungan yang terus berkembang.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan lingkungan di Kota Pekanbaru dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, menciptakan kota yang hijau, bersih, dan layak huni untuk masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara
- Agoes Soegianto. (2010). Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan. Surabaya: Airlangga University Press,
- Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Bandung CV. Pustaka Setia
- Husaini Usman. (2017). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kasiram Mohammad. (2010). Metodologi Penelitian. Malang:UIN-Maliki Press.
- RM Gatot Soemartono. (1991). Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika
- Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta